

Analisis Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Diskopukmp Provinsi Papua Tengah

Andres Richard Daniel Maturbongs^{1*}, Kristian H.P Lambe², Yunus Sirante³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

andrematurbongs80@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DiskopUKMP) Provinsi Papua Tengah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKA di DiskopUKMP telah mengikuti pedoman teknis pemerintah melalui sistem SIPD, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, koordinasi antarunit yang belum optimal, serta perubahan regulasi dan alokasi anggaran yang dinamis. Meskipun demikian, RKA yang disusun secara lebih partisipatif mampu mendukung efisiensi pelaksanaan program, peningkatan akuntabilitas, dan pencapaian indikator kinerja organisasi. Faktor pendukung utama adalah kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sistem informasi, serta arahan pimpinan, sedangkan hambatan mencakup kapasitas teknis SDM, gangguan sistem, dan revisi mendadak dari pagu anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas bidang, optimalisasi penggunaan SIPD, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya. Dengan demikian, efektivitas penyusunan RKA dapat semakin diperkuat untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Rencana Kerja dan Anggaran, efektivitas, kinerja organisasi, DiskopUKMP, Papua Tengah

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Work and Budget Plan (RKA) preparation in improving the performance of the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade (DiskopUKMP) of Central Papua Province. Employing a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that although the RKA preparation process has generally followed government technical guidelines through the SIPD system, several challenges remain, including limited time allocation, suboptimal inter-unit coordination, and frequent changes in regulations and budget allocations. Nevertheless, a more participatory and integrated RKA preparation process has been shown to enhance program efficiency, accountability, and the achievement of organizational performance indicators. Supporting factors include human resource competence, availability of information systems, and leadership direction, while inhibiting factors consist of limited technical capacity, system disruptions, and sudden revisions of budget ceilings. The study recommends strengthening human resource capacity, enhancing cross-unit coordination, optimizing the use of the SIPD system, and systematically utilizing evaluation results as the basis for subsequent planning. Strengthening these aspects is expected to improve the effectiveness of RKA preparation and support sustainable organizational performance within local government agencies.

Keywords: Work and Budget Plan, effectiveness, organizational performance, DiskopUKMP, Central Papua

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat telah mendorong penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi untuk mendukung penyusunan RKA secara real-time dan terstandarisasi (Rizal & Firmansyah, 2024).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan SIPD memiliki efektivitas yang bervariasi di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Gresik, perencanaan anggaran berbasis SIPD dinilai efektif melalui beberapa dimensi seperti ketepatan, akuntabilitas, efisiensi biaya, dan integrasi data (Tumija & Ramadhan, 2023). Namun, di Kota Denpasar, penerapan SIPD belum optimal karena masalah teknis, minimnya pelatihan, serta integrasi data yang belum memadai sehingga berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan (Tekon & Romarina, 2024). Hal serupa ditemukan di Tulungagung, di mana penguasaan teknik informatika dan aplikasi SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyusunan RKA (Darmasto & Saputro, 2024).

Berikut adalah tabel yang merangkum temuan empiris untuk memperjelas konteks dan urgensi penelitian:

Tabel 1. Temuan Empiris

Lokasi	Temuan Utama	Tahun
Gresik (Jawa Timur)	SIPD efektif dalam dimensi kegunaan, akuntabilitas, objektivitas, biaya, dan waktu	2023 (ejournal.ipdn.ac.id)
Denpasar (Bali)	SIPD belum efektif akibat adaptasi pengguna, gangguan sistem, dan minim sosialisasi	2024 (ejournal.ipdn.ac.id , ResearchGate)
Tulungagung	Penguasaan TI dan SIPD berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penyusunan RKA	2024 (Ejournal Uniska Kediri)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena mengisi celah antara potensi SIPD sebagai sarana digital terintegrasi dalam penyusunan RKA dan realitas pelaksanaannya di tingkat daerah. Terdapat variasi kesiapan SDM, infrastruktur teknis, dan sosialisasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIPD. Dengan memahami faktor-faktor penentu—baik pendukung maupun penghambat—penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perangkat daerah untuk memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas perencanaan anggaran secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas penyusunan RKA di DiskopUKMP Provinsi Papua Tengah melalui aplikasi SIPD?
2. Faktor pendukung apa saja yang memperkuat efektivitas penyusunan RKA menggunakan SIPD?
3. Apa saja hambatan teknis maupun non-teknis yang mengurangi efektivitas penyusunan RKA melalui SIPD?
4. Bagaimana rekomendasi strategi peningkatan efektivitas penyusunan RKA berbasis SIPD di tingkat daerah?

TINJAUAN LITERATUR

Perencanaan & Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja mengintegrasikan tujuan, indikator, serta alokasi sumber daya agar akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil (outcome). Dalam konteks Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen ini memuat program, kegiatan, target kinerja, dan kebutuhan biaya untuk satu tahun anggaran, serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Gagasan tersebut menempatkan RKA sebagai instrumen kunci untuk memastikan keterkaitan langsung antara prioritas, output, dan alokasi anggaran. (Mardiasmo, 2018; Kementerian PANRB, 2020).

Efektivitas Organisasi Sektor Publik

Efektivitas organisasi diukur dari tingkat pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, serta kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan sumber daya. Dalam OPD, efektivitas disangga

oleh tata kelola yang baik—transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi—serta keselarasan dengan rencana strategis. (Kementerian PANRB, 2020; OECD, 2019).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKA

SIPD diposisikan sebagai infrastruktur digital untuk standarisasi proses perencanaan—penganggaran di daerah. Pada praktiknya, efektivitas penerapan SIPD ditentukan oleh kapasitas SDM, koordinasi lintas-bidang, kesiapan infrastruktur, dan kedisiplinan waktu, sementara dinamika regulasi dan pagu kerap menjadi kendala. Bukti lapangan dalam tesis menunjukkan faktor pendukung (ketersediaan SIPD, kerja sama internal, arahan pimpinan) dan hambatan (perubahan regulasi, data terlambat, gangguan teknis, revisi pagu, serta waktu terbatas).

Bukti Empiris Terkini tentang Efektivitas RKA

Studi-studi mutakhir menegaskan bahwa:

- Partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan RKA meningkatkan akurasi rencana dan capaian kinerja (Putra & Sari, 2023).
- Penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi sistem informasi mempermudah monitoring dan mendorong pencapaian target (Rahman & Wibowo, 2022).
- Faktor SDM dan koordinasi adalah determinan utama efektivitas RKA (Ningsih & Hidayat, 2021).
- Efektivitas RKA ↔ kualitas layanan publik bergerak positif (Wijaya & Sulaiman, 2022).
- Pada konteks Papua (Kep. Yapen), SIPD meningkatkan efektivitas dan transparansi, namun tetap memerlukan peningkatan kapasitas dan evaluasi berkelanjutan (Ayomi, 2024).

Literatur di atas mengarah pada pola: Penyusunan RKA yang efektif—didukung kapasitas SDM, koordinasi, dan pemanfaatan SIPD—akan meningkatkan efisiensi program, akuntabilitas, dan pencapaian indikator kinerja OPD. Sebaliknya, hambatan teknis–nonteknis menurunkan efektivitas RKA dan capaian kinerja. Kerangka konseptual tesis memosisikan (a) kualitas proses RKA) dan (b) faktor

pendukung/penghambat sebagai penentu (c) kinerja organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menggali secara mendalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, dalam hal ini DiskopUKMP Provinsi Papua Tengah. Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara kontekstual, berdasarkan pengalaman aktor yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran daerah (Creswell, 2023). Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu institusi dengan permasalahan spesifik sehingga dapat dianalisis secara mendalam (Yin, 2018).

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi RKA di lingkungan DiskopUKMP Provinsi Papua Tengah, meliputi kepala dinas, kepala bidang, staf perencana, bendahara, serta pihak pendukung dari Bappeda dan BPPKAD provinsi. Dari populasi tersebut, penelitian menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan kunci, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran strategis dalam proses penyusunan RKA. Informan terdiri atas empat orang pejabat struktural dan staf terkait, yang mewakili perspektif pengambil kebijakan, pengelola keuangan, perencana teknis, dan pengendali anggaran. Purposive sampling sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi dibanding jumlah responden (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Penelitian ini dilakukan di kantor DiskopUKMP Provinsi Papua Tengah, Nabire, dengan waktu pelaksanaan selama satu bulan pada tahun 2025. Lokasi tersebut dipilih karena DiskopUKMP memiliki peran strategis dalam pemberdayaan koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian, serta menjadi salah satu OPD yang memiliki tantangan besar dalam optimalisasi perencanaan dan penganggaran. Konteks lokal Papua Tengah juga memberi nilai tambah bagi penelitian ini karena dinamika sosial, ekonomi, dan birokrasi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam dengan informan kunci menggunakan pedoman semi-terstruktur agar tetap fleksibel, (2) observasi partisipatif terhadap proses penyusunan RKA dan interaksi antarpegawai, serta (3) studi dokumentasi terhadap dokumen RKA, laporan kinerja, regulasi terkait, dan notulen rapat. Kombinasi ketiga teknik ini dipilih untuk memperkuat validitas melalui triangulasi sumber dan metode (Lincoln & Guba, 2021).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Prosesnya meliputi transkripsi hasil wawancara, pengorganisasian data berdasarkan kategori, identifikasi pola dan tema, serta interpretasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik analisis ini sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang berorientasi pada pemahaman makna dan pola hubungan antarvariabel non-numerik (Braun & Clarke, 2019). Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan triangulasi antar sumber dan teknik, reflektivitas peneliti, serta pemeriksaan silang dengan dokumen resmi. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penyusunan RKA dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan empat informan kunci yang memiliki peran strategis dalam penyusunan RKA pada DiskopUKMP Provinsi Papua Tengah. Karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Informan	Nama	Jabatan	Peran Utama dalam RKA
1	Lorenzo Persulesy, S.E.	Kepala Bidang Koperasi & UKM	Perumusan program kegiatan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, evaluasi capaian kinerja.
2	Daniel Inggirik, A.Md.IP	Bendahara DiskopUKMP	Pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan realisasi anggaran.
3	Ch. Richard	Kepala Bidang Anggaran,	Pengendalian anggaran makro,

Informan	Nama	Jabatan	Peran Utama dalam RKA
	Kabuhung, M.AP	BPPKAD Provinsi Papua Tengah	verifikasi dan validasi RKA dari seluruh OPD.
4	Justinus J. Maryen, MIP	Kepala Sub Bidang Perencanaan & Pengembangan Kawasan Strategis & Khusus	Integrasi program strategis dan pengembangan kawasan prioritas dalam dokumen perencanaan.

Sumber: Data primer (2025)

Proses Penyusunan RKA di DiskopUKMP Papua Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RKA telah mengikuti pedoman teknis pemerintah melalui **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**. Tahapan dimulai dari pengumpulan usulan kegiatan per bidang, konsolidasi internal, input data ke SIPD, pembahasan lintas OPD, hingga validasi oleh Bappeda dan BPPKAD.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa waktu penyusunan yang terbatas serta koordinasi antarbidang yang belum optimal sering menimbulkan keterlambatan. Seperti disampaikan oleh Informan 1:

“Penyusunan RKA dimulai dari pengumpulan usulan tiap bidang, lalu dibahas di forum internal. Tapi kadang koordinasi antarbidang kurang sinkron, apalagi kalau waktu penyusunan sangat singkat.” (Wawancara, Lorenzo Persulesy).

Efektivitas Penyusunan RKA terhadap Kinerja

Secara umum, RKA dinilai sudah mencerminkan kebutuhan program prioritas DiskopUKMP, meskipun belum seluruh rencana dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan adanya refocusing dari pusat. Menurut Informan 2:

“RKA sudah cukup mencerminkan kebutuhan prioritas, tetapi kadang ada pemangkasan anggaran di tengah tahun sehingga beberapa program tidak bisa dijalankan penuh.” (Wawancara, Daniel Inggirik).

Selain itu, RKA terbukti berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Program pemberdayaan UMKM, misalnya, dapat berjalan lebih efisien ketika perencanaan dilakukan dengan jelas dan terukur. Informan 3 menegaskan:

“RKA merupakan instrumen utama pencapaian kinerja. Kalau RKA disusun dengan baik, program bisa berjalan lebih efisien dan indikator kinerja lebih mudah dicapai.” (Wawancara, Richard Kabuhung).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penyusunan RKA.

1. Faktor Pendukung:

- o Pemanfaatan SIPD yang mendukung standarisasi dan dokumentasi.
- o Kompetensi SDM yang cukup memahami regulasi teknis.
- o Arahan pimpinan serta komunikasi internal yang intensif.

2. Faktor Penghambat:

- o Perubahan regulasi atau kebijakan fiskal secara mendadak.
- o Keterlambatan data perencanaan dari unit kerja.
- o Gangguan teknis dalam sistem SIPD.
- o Koordinasi antarbidang yang belum optimal.

Sebagaimana ditegaskan oleh Informan 4:

“Kendala utama biasanya terkait waktu penyusunan yang singkat, perubahan pagu anggaran mendadak, dan gangguan SIPD. Koordinasi internal sering jadi tantangan.” (Wawancara, Justinus J. Maryen).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penyusunan RKA tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap pedoman teknis, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, kapasitas SDM, dan konsistensi kebijakan fiskal. Hal ini sejalan dengan temuan Ningsih & Hidayat (2021) bahwa kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarunit menjadi penentu utama efektivitas RKA, serta Rahman & Wibowo (2022) yang menekankan pentingnya integrasi sistem informasi dalam penganggaran berbasis kinerja.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun RKA telah mendukung pencapaian indikator kinerja, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan dana dan dinamika kebijakan. Kondisi ini sesuai dengan studi Putra & Sari (2023) yang menekankan peran partisipasi pemangku kepentingan dalam memperkuat relevansi perencanaan dan pencapaian target organisasi.

Dengan demikian, efektivitas penyusunan RKA di DiskopUKMP Papua Tengah dapat dikategorikan **cukup baik**, tetapi memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi SIPD, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang lebih sistematis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di DiskopUKMP Provinsi Papua Tengah telah mengikuti pedoman teknis pemerintah melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Secara umum, RKA yang disusun sudah mencerminkan kebutuhan program prioritas dan mendukung pencapaian indikator kinerja organisasi. Namun, realisasi program belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan anggaran, perubahan regulasi, serta keterlambatan data perencanaan.

Faktor pendukung efektivitas RKA meliputi pemanfaatan SIPD, kompetensi sumber daya manusia, arahan pimpinan, serta komunikasi internal yang cukup baik. Sementara itu, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan waktu penyusunan, gangguan teknis SIPD, koordinasi antarunit yang belum optimal, serta revisi mendadak terhadap pagu anggaran.

Dengan demikian, efektivitas penyusunan RKA di DiskopUKMP Papua Tengah dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, koordinasi lintas bidang, serta pemanfaatan sistem informasi agar benar-benar mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran praktis sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM** melalui pelatihan rutin mengenai perencanaan

dan penganggaran berbasis kinerja, serta pemanfaatan SIPD secara optimal.

2. **Penguatan Koordinasi Lintas Bidang** dengan membentuk tim kerja khusus penyusun RKA yang melibatkan seluruh unit, didukung oleh jadwal kerja yang terstruktur dan forum evaluasi rutin.
3. **Optimalisasi SIPD** dengan menyediakan dukungan teknis dan infrastruktur digital yang memadai, termasuk backup data untuk mengatasi gangguan sistem.
4. **Pemanfaatan Hasil Evaluasi** secara lebih sistematis sebagai dasar penyusunan RKA tahun berikutnya agar perencanaan lebih realistis, berbasis kebutuhan, dan selaras dengan capaian kinerja.
5. **Pelibatan Stakeholder** dalam forum konsultasi publik terbatas untuk memperkuat relevansi program, khususnya terkait kebutuhan koperasi dan UMKM di Papua Tengah.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas penyusunan RKA dapat ditingkatkan sehingga mendukung pencapaian kinerja DiskopUKMP secara lebih terukur, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi, N. G., & Asri, J. D. (2024). *Efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua* (Tesis doktoral, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Creswell, J. W. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darmasto, H., & Saputro, R. A. (2024). Pengaruh penguasaan teknik informatika terhadap efektivitas penyusunan RKA berbasis SIPD di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Otonomi Daerah*, 12(2), 45–58.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2020). *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*. Jakarta: KemenPANRB.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandil, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, L., & Hidayat, R. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran di Dinas Koperasi dan UKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 112–125.
- OECD. (2019). *Government at a glance 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Putra, A., & Sari, N. (2023). Efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam meningkatkan kinerja organisasi

- perangkat daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 34–47.
- Rahman, F., & Wibowo, D. (2022). Pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap pencapaian target organisasi pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(3), 211–224.
- Rizal, M., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 55–66.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Teken, I. K., & Romarina, P. (2024). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar. *Jurnal Tata Pemerintahan*, 16(2), 78–90.
- Tumija, M., & Ramadhan, F. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran berbasis SIPD di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.
- Wijaya, T., & Sulaiman, A. (2022). Dampak penyusunan RKA terhadap efektivitas pelayanan publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(1), 23–35.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.